

Pengaruh Desentralisasi BPHTB Terhadap Penerimaan Asli Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Istimewa Yogyakarta

The Effect of Decentralization of BPHTB on Local Revenue and Its Impact on Economic Growth in Yogyakarta Special Region

Wuku Astuti^a

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Kristiana Sri Utami^b

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Yuliana Endah Widyaningsih^c

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

ARTICLES INFORMATION

E B B A N K

Vol. 8, No. 2, Desember 2017

Halaman : 51 – 60

© LP3M STIEBBANK

ISSN (online) : 2442 - 4439

ISSN (print) : 2087 - 1406

Keywords :

BPHTB, PAD, and Economic Growth

JEL classifications :

P44, R38

Contact Author :

^a wukuastuti@gmail.com

^b uwmyendah@yahoo.com

^c utamisiswaya@yahoo.com

ABSTRACT

This study examines the effect of decentralization of Land Acquisition Rights (BPHTB) on Local Own Revenue (PAD) and its impact on district and / or city economic growth in Yogyakarta Special Region (DIY). The population in this research is the data of budget realization as well as the data of economic growth of regency / city in DIY. The selected sample is budget realization data and economic growth data of regencies / cities in DIY two years before decentralization and two years after decentralization of BPHTB. The normality test of data distribution is done by classical assumption test. The determination coefficient test is performed to determine the accuracy of the use of independent variables. To test the influence of independent variable to the dependent variable is done regression analysis. Whereas hypothesis testing is determined by looking at p-value. The results of statistical tests proved that the decentralization of BPHTB into local taxes will support the increase of regional PAD, and Economic Growth.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Terbitnya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengawali dimulainya penerapan Otonomi Daerah di Indonesia. Undang-Undang yang mulai diberlakukan tahun 2001 tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004.

Penerapan otonomi daerah pada dasarnya memiliki tujuan untuk peningkatan pendapatan daerah dan juga pertumbuhan ekonomi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Komponen PAD terdiri atas : (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pajak Daerah sebagai salah satu instrumen PAD berasal dari berbagai sumber-sumber pajak, salah satunya adalah pajak yang berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Menurut Resmi (2012) BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas dasar perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang menyebabkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, para wajib pajak melaporkan pembayaran BPHTB di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama). Tetapi per tanggal 1 Januari 2011, pembayaran pajak tersebut langsung ditangani oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat, atau dengan kata lain pengelolaan BPHTB dialihkan dari pajak pusat menjadi pajak daerah.

Ditetapkannya BPHTB menjadi pajak daerah, memerlukan kesiapan daerah. Kabupaten dan kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia yang telah bersiap dengan desentralisasi BPHTB. Hal ini terlihat dari respon pemerintah daerah yang tidak membutuhkan waktu lama dalam menerbitkan peraturan daerah mengenai BPHTB, yaitu :

1. Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 09 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan.
2. Kabupaten Sleman menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 14 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan.
3. Kabupaten Kulon Progo menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No.9 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
4. Kabupaten Gunung Kidul menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul No. 15 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
5. Kota Yogyakarta dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2010 Tentang Peralihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

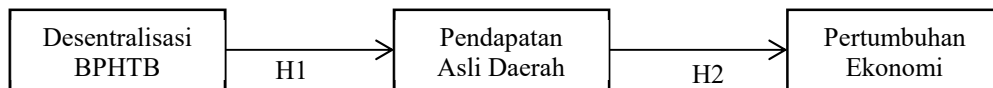
Dengan melihat kesiapan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah, akan berpengaruh terhadap meningkatnya PAD. Peningkatan PAD diharapkan akan mendukung perkembangan perekonomian daerah sehingga pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta akan meningkat.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Karawang dilakukan oleh Kosasih, dkk (2012) dan Purwa, dkk (2014). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa BPHTB berhasil menyumbang hampir setengah dari total PAD Kabupaten Karawang yaitu 49,13%. Sedangkan hasil penelitian Purwa (2014) menunjukkan bahwa BPHTB hanya berpengaruh signifikan terhadap PAD sebelum desentralisasi, BPHTB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, dan setelah desentralisasi BPHTB mengalami penurunan penerimaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Kosasih, dkk (2012) dan Purwa, dkk (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel yaitu variabel Pertumbuhan Ekonomi, periode penelitian dari tahun 2009 – 2012, dan juga metode pengujian hipotesis yang digunakan.

Desain Penelitian

Gambar 1. Desain Penelitian



Hipotesis

H₁ : Desentralisasi BPHTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H₂ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi setelah desentralisasi BPHTB.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah:

- Laporan realisasi penerimaan daerah kabupaten dan/ atau kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Data Pertumbuhan Ekonomi kabupaten dan/ atau kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sampel dipilih dengan menggunakan kriteria :

- Laporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten dan/ atau kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009 – 2010 (sebelum diakuinya BPHTB menjadi pajak daerah).
- Laporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten dan/ atau kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011 – 2012 (setelah diakuinya BPHTB menjadi pajak daerah).
- Data Pertumbuhan Ekonomi kabupaten dan/ atau kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2012.

Identifikasi Variabel

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAD terdiri atas : (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) lain-lain PAD yang sah.

- Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas dasar perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang menyebabkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

- Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah diukur dengan cara membandingkan PDRB tahun yang sedang berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya.

Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan terdiri atas :

- a) Uji Normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*.
- b) Uji Multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor (VIF)*.
- c) Uji Autokorelasi dengan pengujian *Durbin-Watson (DW)*.
- d) Uji Heteroskedastisitas dengan uji Glejser

Uji Koefisien Determinasi

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of fit*nya. Pengukuran *Goodness of fit* dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinasinya (R^2). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Analisis Regresi

Pengujian pengaruh variabel independen BPHTB terhadap variabel dependen yaitu PAD dapat dirumuskan :

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan : Y_1 = PAD

α = konstanta

β_1 = koefisien regresi

X_1 = variabel BPHTB

e = error

Pengujian pengaruh variabel PAD sebagai variabel independen terhadap variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi dapat dirumuskan :

$$Y_2 = \alpha + \beta_2 X_2 + e \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan : Y_2 = pertumbuhan ekonomi

α = konstanta

β_2 = koefisien regresi

X_2 = variabel PAD

e = error

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ditentukan dengan melihat nilai *p-value*. Langkah-langkah untuk pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

- 1) Menentukan hipotesis

H_{01} : Desentralisasi BPHTB tidak berpengaruh positif terhadap PAD.

H_{a1} : Desentralisasi BPHTB berpengaruh positif terhadap PAD.

H_0 : PAD tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

H_a : PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2) Kriteria *P-Value* yang dipakai adalah:

- a) Jika $p\text{-value} \leq 5\%$, maka signifikan, artinya H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b) Jika $p\text{-value} > 5\%$, maka tidak signifikan, artinya H_0 diterima dan H_a ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat analisis yang digunakan berupa uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat uji *Kolmogorov-Smirnov* yang hasilnya disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual	Unstandardized Residual
N		20	20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,000	0,000
	Std. Deviation	50338,935	0,524
Most Extreme Differences	Absolute	0,193	0,166
	Positive	0,193	0,091
	Negative	-0,162	-0,166
Kolmogorov-Smirnov Z		0,865	0,741
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,442	0,643

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : data sekunder yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel 1 diatas, nilai *Kolmogorov-Smirnov* untuk model regresi pertama sebesar 0,865 dan tingkat signifikansinya sebesar 0,442. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yaitu jika probabilitas $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal, sedangkan jika probabilitas $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal, maka disimpulkan bahwa data yang di uji pada model regresi pertama terdistribusi normal. Nilai *Kolmogorov-Smirnov* untuk model regresi kedua sebesar 0,741 dan tingkat signifikansinya sebesar 0,643. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa data yang diuji pada model regresi kedua terdistribusi normal karena diperoleh signifikansi sebesar 0,643.

Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi di antara variabel independen dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor (VIF)*. Hasil uji Multikolonieritas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	4,491	0,261		17,207	0,000		
1 BPHTB	1,760E-11	0,000	0,326	0,924	0,368	0,317	3,155
PAD	1,926E-06	0,000	0,275	0,781	0,445	0,317	3,155

a. Dependent Variable: PE

Sumber : data sekunder yang diolah (2016)

Dari tabel hasil uji multikolonieritas di atas, masing-masing variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen.

Uji Autokorelasi

Hasil uji Autokorelasi untuk kedua model regresi disajikan sebagai berikut :

a. Model Regresi Pertama

Tabel 3. Hasil Uji Durbin Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,826 ^a	0,683	0,665	51718,339	1,040

a. Predictors: (Constant), BPHTB

b. Dependent Variable: PAD

Sumber : data sekunder yang diolah (2016)

Berdasarkan tabel di atas, dengan menggunakan sampel sebanyak 20 (n=20) yang berasal dari 5 kabupaten/kota dengan periode pengamatan 4 tahun, diperoleh nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 1,040. Nilai D-W menurut tabel dengan tingkat signifikansi 5% (n=20 dan k=1) didapat angka $d_l=1,201$ dan $d_u=1,411$. Nilai DW hitung 1,040 lebih kecil dari d_u .

b. Model Regresi Kedua

Tabel 4. Hasil Uji Durbin Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,545 ^a	0,297	0,258	0,539	1,612

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Dependent Variable: PE

Sumber : data sekunder yang diolah (2016)

Dengan menggunakan sampel sebanyak 20 (n=20) yang berasal dari 5 kabupaten/kota dengan periode pengamatan 4 tahun, maka berdasarkan tabel di atas nilai *Durbin Watson* (DW) yang diperoleh adalah 1,612. Nilai D-W menurut tabel dengan tingkat signifikansi 5% (n=20 dan k=1) didapat angka

$d_l=1,201$ dan $d_u=1,411$. Nilai DW hitung 1,612 lebih besar dari d_u yakni 1,411 dan kurang dari $4-d_u$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dengan Glejser untuk kedua model disajikan sebagai berikut :

a. Model Regresi Pertama

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	42104,820	7363,682		5,718	0,000
BPHTB	-1,611E-07	0,000	-0,068	-0,287	0,777

a. Dependent Variable: RES3

Sumber : data sekunder yang diolah (2016)

Berdasarkan output pada tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi variabel BPHTB sebesar 0,777 lebih besar dari 0,05 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel BPHTB.

b. Model Regresi Kedua

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,623	0,116		5,350	0,000
PAD	-1,620E-06	0,000	-0,460	-2,201	0,041

a. Dependent Variable: RES4

Sumber : data sekunder yang diolah (2016)

Berdasarkan output pada tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi variabel PAD sebesar 0,041 lebih kecil dari 0,05 berarti terjadi heteroskedastisitas pada variabel PAD.

Uji Koefisien Determinasi R²

Nilai *adjusted R²* pada model regresi pertama dapat dilihat pada tabel 3 diatas. Dari tabel tersebut diperoleh nilai *adjusted R²* sebesar 0,683. Hal ini berarti kemampuan variabel BPHTB dalam menjelaskan variasi variabel dependen PAD adalah sebesar 68,3% sedangkan 31,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lainnya.

Sedangkan nilai *adjusted R²* pada model regresi kedua dapat dilihat pada tabel 4 diatas. Dari tabel tersebut diperoleh nilai *adjusted R²* sebesar 0,297. Hal ini berarti kemampuan variabel PAD dalam menjelaskan variasi variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 29,7% sedangkan 70,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lainnya.

Analisis Regresi

Dalam penelitian ini terdapat dua model regresi yang diajukan dengan menggunakan regresi linear sederhana.

a. Model Regresi Pertama

Tabel 7. Hasil Uji P-Value

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	89164,33058	13454,92944	6,626889495	3,20324E-06
BPHTB	6,38419E-06	1,02511E-06	6,227825877	7,09173E-06

Sumber : data sekunder yang diolah (2016)

Model regresi pertama adalah sebagai berikut :

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

- Y₁ = PAD
- X₁ = variabel BPHTB
- α = konstanta
- E = error
- β₁ = koefisien regresi

Berdasarkan hasil pengujian p-value pada tabel 7 diatas jika dimasukkan kedalam model regresi maka akan diperoleh hasil :

$$Y_1 = 89164,33 + 6,38X_1 + e \dots\dots\dots(1)$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa besarnya konstanta adalah 89164,33, artinya apabila variabel independen yaitu BPHTB tidak mengalami perubahan atau tetap maka besarnya PAD adalah Rp 89.164.330.000. Sedangkan jika nilai BPHTB naik sebesar 1% maka PAD akan naik sebesar 6,38%.

b. Model Regresi Kedua

Tabel 8. Hasil Uji P-Value

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	4,360279561	0,218624477	19,9441509	1,01086E-13
PAD	3,80865E-06	1,38223E-06	2,755434797	0,013020447

Sumber : data sekunder yang diolah (2016)

Model regresi kedua adalah sebagai berikut :

$$Y_2 = \alpha + \beta_1 X_1 + e \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

- Y₂ = pertumbuhan ekonomi
- α = konstanta
- β₂ = koefisien regresi
- X₂ = variabel PAD
- e = error

Berdasarkan hasil pengujian p-value pada tabel 8 diatas jika dimasukkan kedalam model regresi maka akan diperoleh hasil :

$$Y_2 = 4,36 + 3,80X_2 + e \dots\dots\dots(2)$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa besarnya konstanta adalah 4,36, artinya apabila variabel independen yaitu PAD tidak mengalami perubahan atau tetap maka besarnya Pertumbuhan

Ekonomi adalah 4,36%. Sedangkan jika nilai PAD naik sebesar 1% maka Pertumbuhan Ekonomi akan naik sebesar 3,8%.

Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menguji setiap hipotesis yang diajukan dengan melihat *p-value* dari masing hasil pengujian, hasil dari pengujian diuraikan sebagai berikut:

H_1 : Desentralisasi BPHTB berpengaruh positif terhadap PAD

Dari tabel 7 di atas, nilai *p-value* untuk variabel independen yaitu BPHTB diperoleh nilai sebesar 7,09. Berdasarkan kriteria *p-value* yang ditentukan, hasil pengujian dikatakan signifikan jika nilainya tidak lebih dari 0,05, maka berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa variabel BPHTB berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel PAD (**H_1 ditolak**). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Purwa (2014) bahwa BPHTB hanya berpengaruh signifikan terhadap PAD sebelum desentralisasi.

H_2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari tabel 8 di atas, nilai *p-value* untuk variabel independen yaitu BPHTB diperoleh nilai sebesar 0,013. Berdasarkan kriteria *p-value* yang ditentukan, hasil pengujian dikatakan signifikan jika nilainya tidak lebih dari 0,05, maka berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (**H_2 diterima**).

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh desentralisasi BPHTB terhadap PAD dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan di bab sebelumnya adalah desentralisasi BPHTB berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD. Dari hasil pengujian statistik terbukti bahwa desentralisasi BPHTB menjadi pajak daerah akan mendukung peningkatan PAD daerah tersebut.

Kesimpulan yang kedua adalah PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan nilai PAD yang tinggi, berarti daerah akan memiliki kemampuan optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Keterbatasan

Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari publikasi anggaran pemerintah daerah, data PDRB, dan data pajak daerah, dengan waktu pengamatan empat tahun yaitu dua tahun sebelum desentralisasi BPHTB dan dua tahun setelah BPHTB, sehingga belum diperoleh data yang tepat perolehan BPHTB sebelum desentralisasi.
2. Penelitian ini masih sebatas pada kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

Saran

Dari uraian keterbatasan penelitian diatas maka saran-saran yang bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Waktu pengamatan bisa lebih lama tidak hanya empat tahun pengamatan.
2. Penelitian selanjutnya bisa diperluas tidak hanya di Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi bisa di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
3. Pengaruh kenaikan PAD tidak hanya kepada Pertumbuhan Ekonomi, bagi penelitian selanjutnya perlu menambah, mengurangi atau mengganti variabel-variabel tersebut dengan variabel-variabel lain yang dimungkinkan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, A.M dan Rasbin. (2010). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Krisis. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol.2 (1)
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Harinsari, Ratih, dkk. (2012). Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol.2 (1)
- Kosasih, dkk. (2012). Analisis Sistem Pajak BPHTB Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Karawang. *Majalah Ilmiah Solusi Unsika*. Vol.11 (24)
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset
- Resmi, Siti. (2012). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Sukirno, Sadono. (2004). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang No.20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Widjaya, H.A.W. (2004). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta :PT.Rajagrafindo Persada
- Wijaya, IGN Dwi Purwa, dkk. (2014). Pengaruh Desentralisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol.2 (1)
- www.jogjaprovo.go.id
- www.yogyakarta.bps.go.id
- www.bi.go.id
- www.djpk.depkeu.go.id